

Overview I-Account APBN

Pendapatan

Rp9,3 T (652,3%)
▼ -35,9% (yoy)

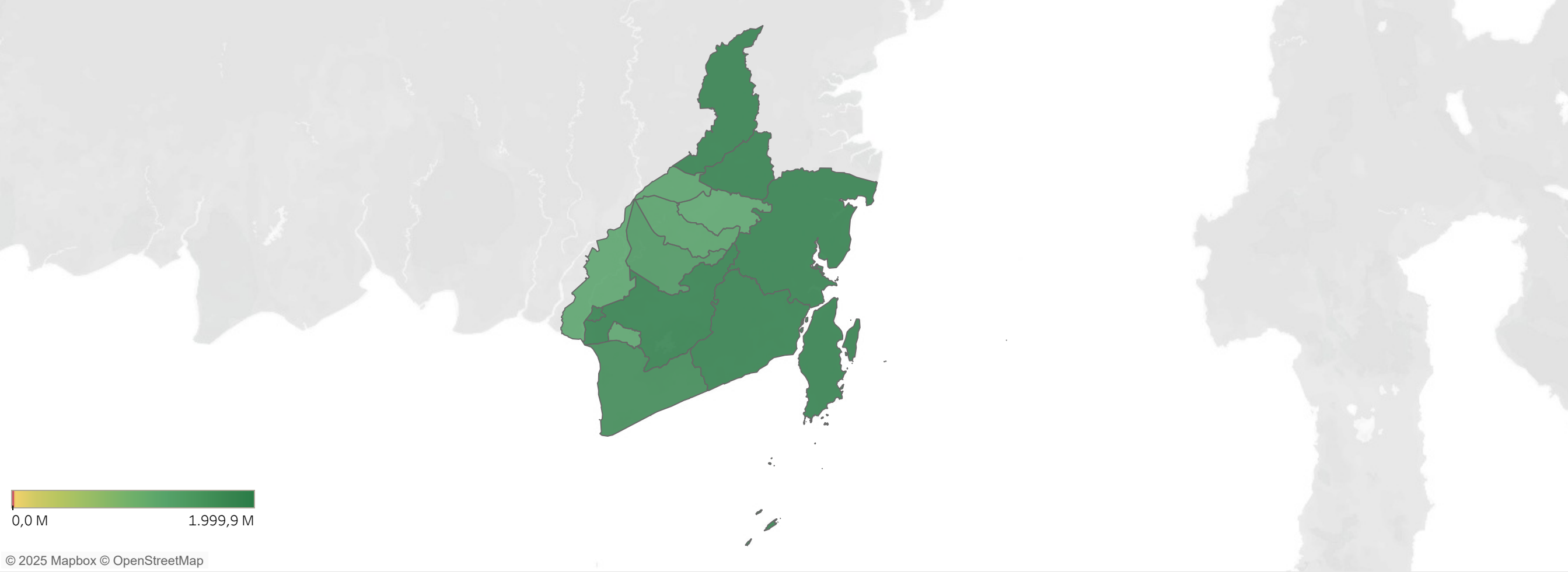
Belanja

Rp30,5 T (74,8%)
▲ 7,2% (yoy)

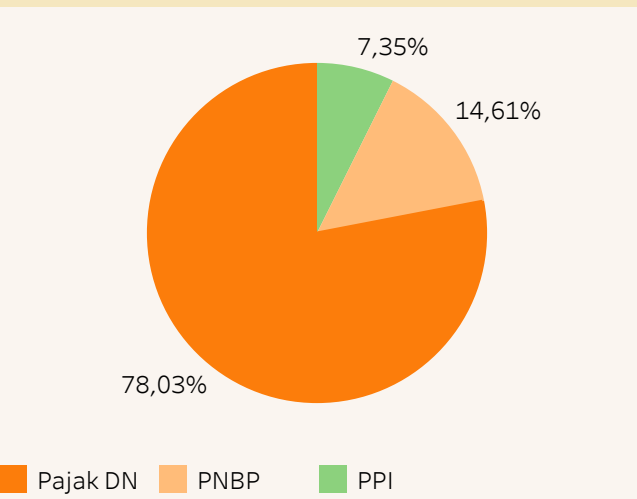
Defisit

Rp-21,2 T (53,9%)
▲ 51,9% (yoy)

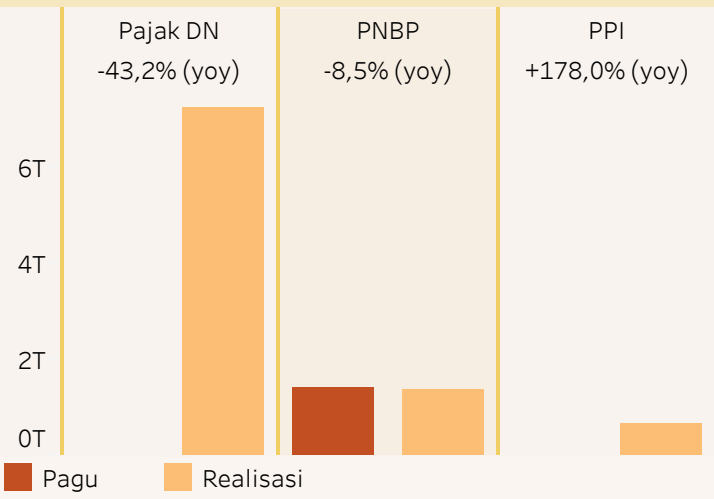
Peta Realisasi Belanja Negara per Wilayah



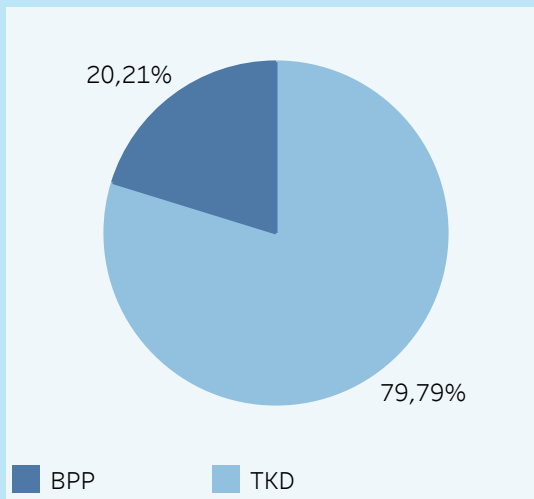
Persentase Komposisi Pendapatan



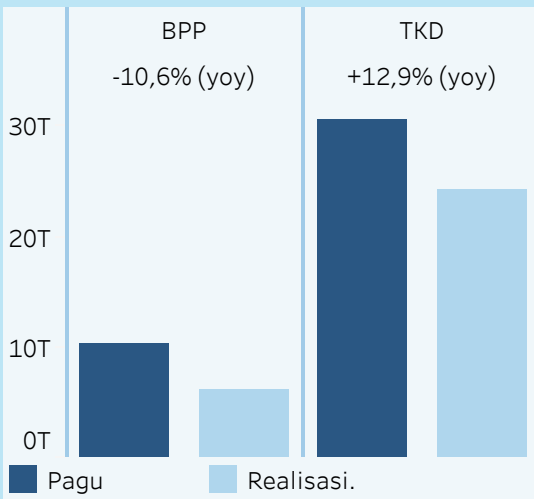
Realisasi per Jenis Pendapatan



Persentase Komposisi Belanja



Realisasi per Jenis Belanja



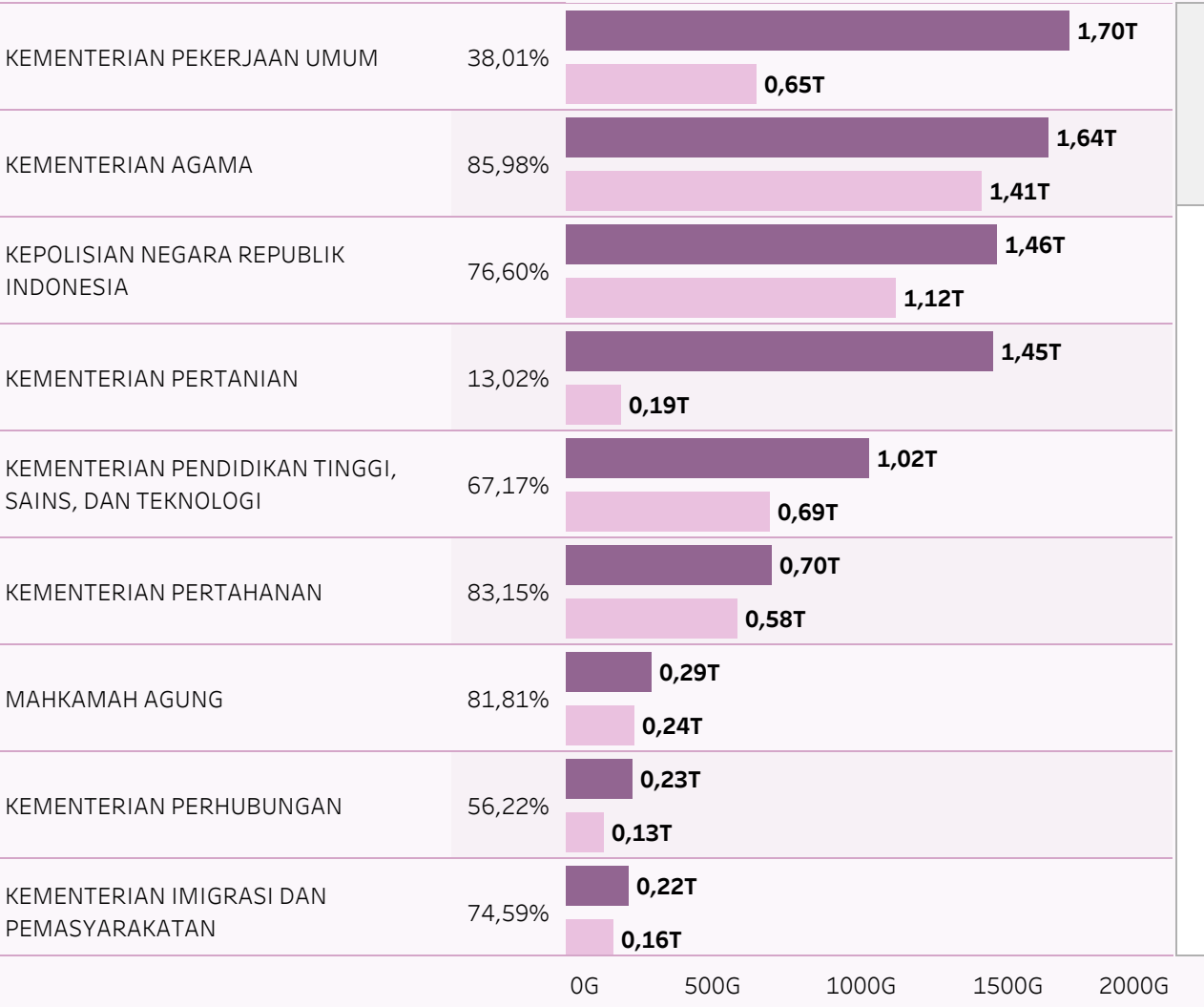
Pendapatan Regional

	Realisasi Y-1	Realisasi	% Growth
Provinsi Kalimantan Selatan	14,5T	9,3 T	▼ 35,90%
Grand Total	14,5T	9,3 T	▼ 35,90%

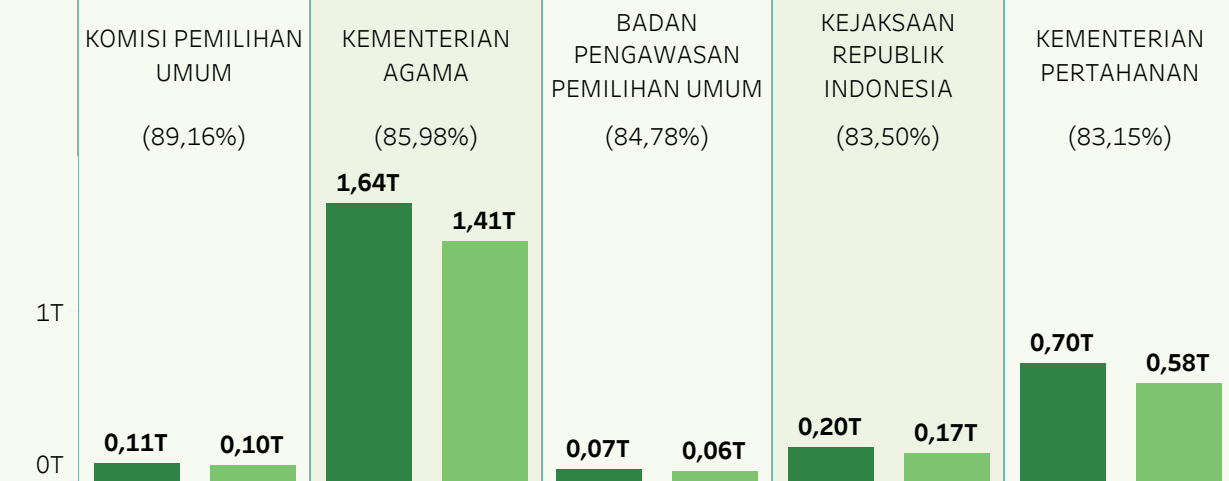
Belanja Regional

	Pagu Y-1	Realisasi Y-1	% thdp Pagu Y-1	Pagu	Realisasi	% thdp Pagu	% Growth
Provinsi Kalimantan Selatan	41,7T	28,5T	68,3%	40,8T	30,5 T	74,8%	▲ 7,18%
Grand Total	41,7T	28,5T	68,3%	40,8T	30,5 T	74,8%	▲ 7,18%

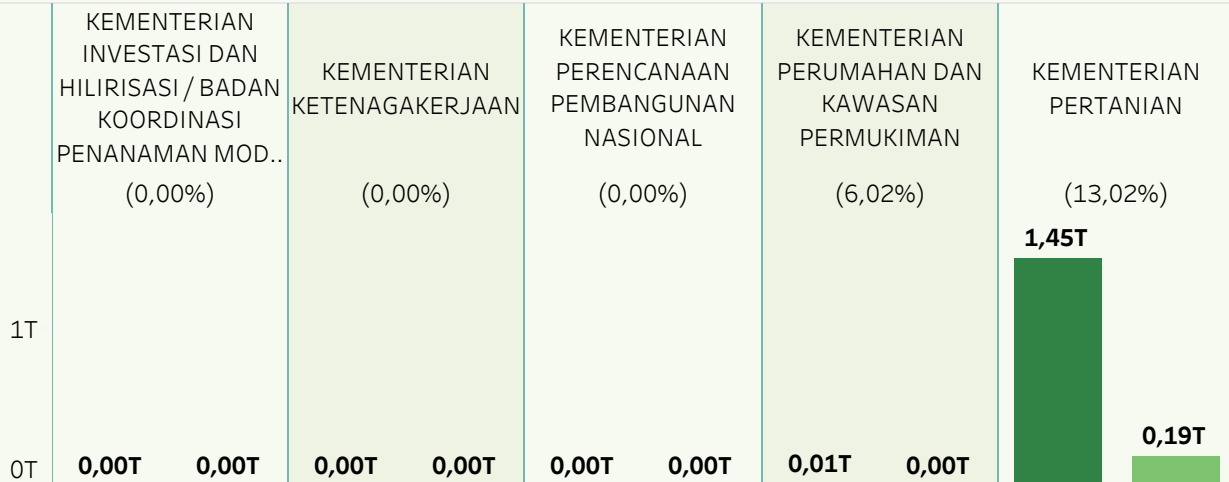
Kinerja 10 KL Pagu Tertinggi



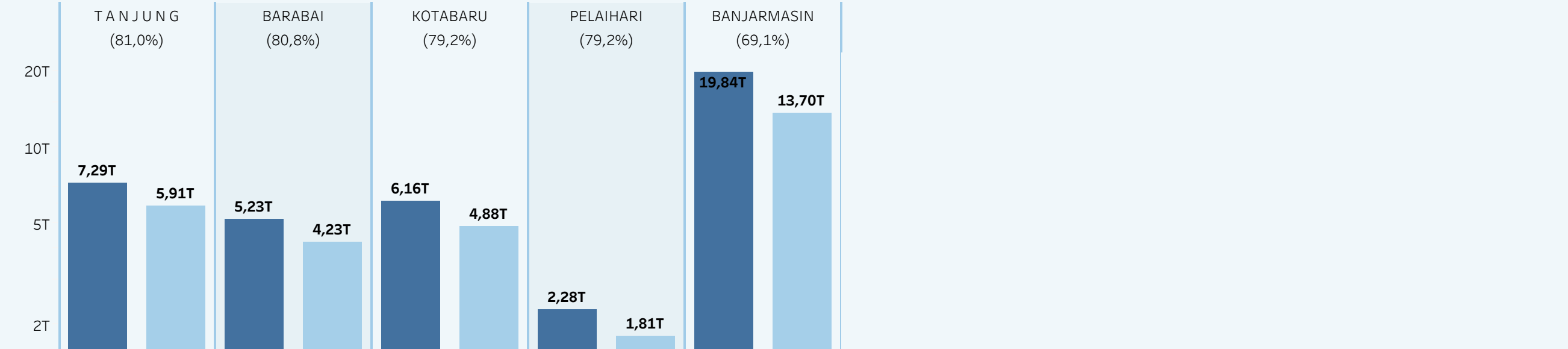
5 KL Persentase Realisasi Tertinggi



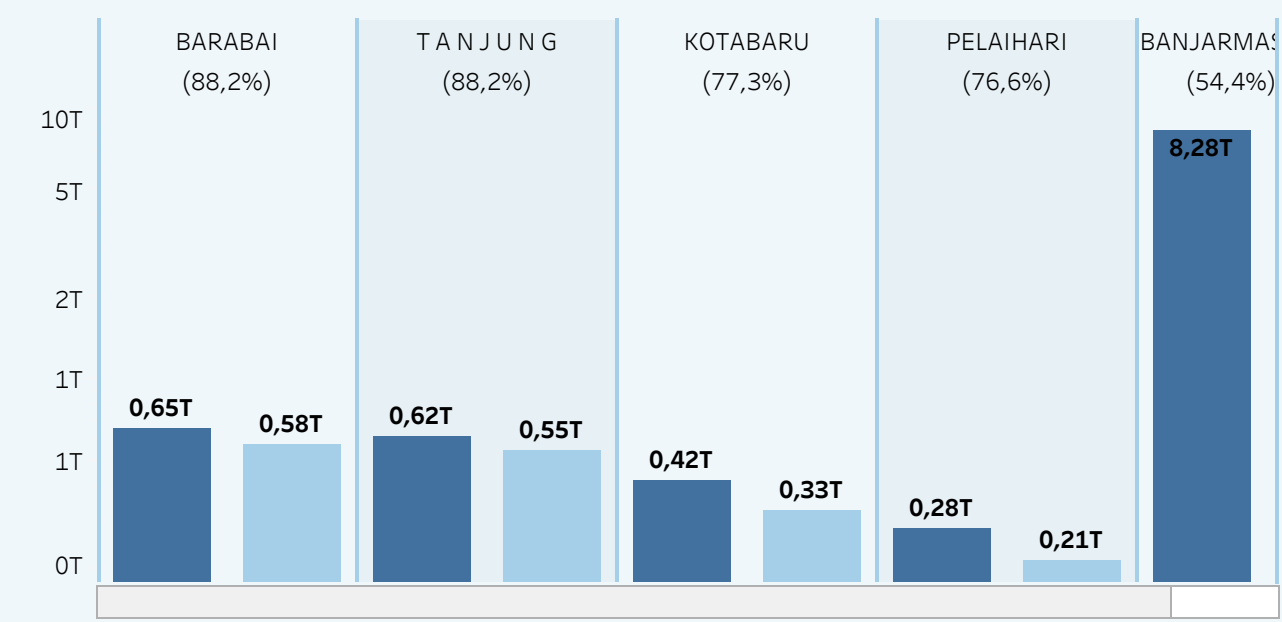
5 KL Persentase Realisasi Terendah



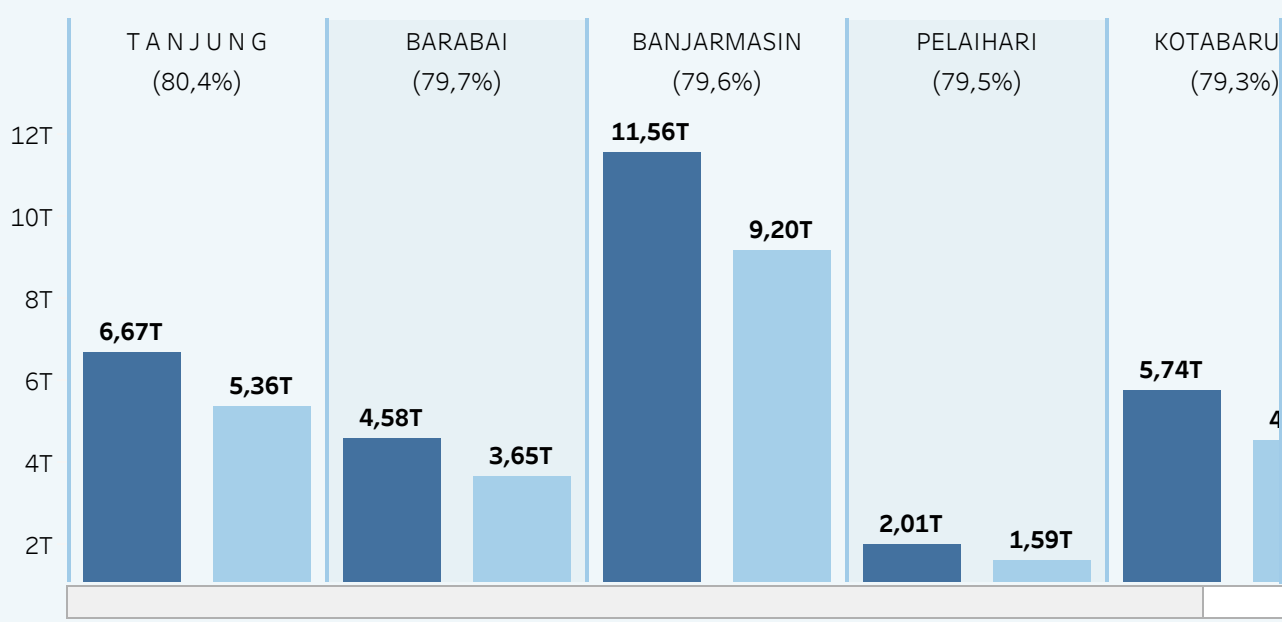
Kinerja Belanja KPPN



Kinerja BPP per KPPN



Kinerja TKD per KPPN



HASIL ANALISIS ISU FISKAL REGIONAL

Analisis Fiskal Regional

A | Perkembangan Pendapatan Negara s.d 10 Oktober 2025

Kinerja Pendapatan Negara sebesar Rp9,3 triliun (42,17% dari target), terkontraksi 35,90% yoy. Realisasi Pajak Dalam Negeri mencapai 35,62% (Rp7,25 triliun), Pajak Perdagangan Internasional mencapai 263,12% (Rp 683,51 miliar), PNBP mencapai 95,83% (Rp1,36 triliun) dari target pendapatan negara sebesar Rp22,04 triliun. Pendapatan negara didominasi oleh Pajak (78,03%).

B | Perkembangan Belanja Negara s.d 10 Oktober 2025

1. **Kinerja Belanja Negara sebesar Rp30,5 triliun (74,8%) dari pagu Rp40,8 triliun, tumbuh 7,18% yoy.** Realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai 60,2% (Rp6,17 triliun) dari pagu Rp10,26 triliun, terkontraksi 10,6% yoy dan Transfer ke Daerah mencapai 79,7% (Rp24,36 triliun) dari pagu Rp30,55 Triliun, tumbuh 12,9% yoy. Belanja Negara didominasi oleh Transfer ke Daerah (79,79%).
2. **Kinerja Belanja 10 K/L Pagu Terbesar,** Kementerian Pekerjaan Umum merupakan K/L dengan pagu terbesar yaitu Rp1,70 triliun. Kinerja tertinggi pada 10 K/L besar terdapat pada Kementerian Agama dengan realisasi 85,98% (Rp1,41 triliun) dari pagu Rp1,64 triliun.
3. **Kinerja Belanja 5 K/L Tertinggi dan Terendah,** Komisi Pemilihan Umum merupakan K/L dengan kinerja realisasi belanja tertinggi yaitu Rp0,10 triliun atau 89,16% dari pagu, dikontribusi oleh belanja barang (95,24% dari pagu atau sebesar Rp61,74 miliar). Sementara, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan K/L dengan kinerja realisasi belanja terendah Rp11,32 miliar atau 6,02% dari pagu, rendahnya realisasi dikontribusi oleh belanja barang (10,85% dari pagu atau sebesar Rp0,68 miliar).
4. **Kinerja KPPN,** KPPN Tanjung merupakan KPPN dengan realisasi tertinggi yaitu 81,0% (Rp5,91 triliun) dari pagu Rp7,29 triliun, didorong oleh kinerja belanja pegawai yang mencapai 98,32% (Rp418,07 miliar) dari pagu Rp425,22 miliar. Sementara, KPPN Banjarmasin merupakan KPPN dengan realisasi terendah yaitu 69,10% (Rp13,70 triliun) dari pagu Rp19,84 triliun, terutama dipengaruhi oleh rendahnya belanja modal yang baru mencapai 36,48%.

Isu dan Rekomendasi Fiskal Regional

A | Isu Pendapatan Negara, meliputi:

Pemerintah melakukan penertiban *shadow economy* untuk memperluas basis pajak. *Shadow economy*, yaitu aktivitas ekonomi bernilai besar namun belum masuk sistem resmi negara. Penertiban *shadow economy* tentunya bukan untuk membebani pedagang kecil, melainkan untuk memberikan keadilan dan keberlanjutan pembangunan negeri. Adapun kriteria aktivitas *shadow economy* adalah Usaha omzet >Rp500 juta/tahun tapi belum terdaftar, Perdagangan bernilai tinggi yang tidak dilaporkan, dan Sektor

Ekonomi besar tapi belum masuk sistem administrasi pajak.

B | Rekomendasi Pendapatan Negara, diperlukan:

Perlu dilakukan identifikasi dan pemetaan sektor usaha yang termasuk *shadow economy*, pemerintah perlu menyusun mekanisme registrasi dan pembinaan wajib pajak baru, termasuk sosialisasi, penyuluhan, dan insentif fiskal bagi pelaku usaha yang baru masuk sistem resmi, agar proses transisi berlangsung lancar, dan diterapkan pengawasan dan monitoring berbasis data digital untuk memastikan kepatuhan, sekaligus meminimalkan beban administrasi bagi usaha mikro dan kecil.

C | Isu Belanja Negara, meliputi:

Satker dalam proses melaksanakan pengadaan barang/jasa yang menggunakan Inaproc berdampak adanya keterlambatan mendaftarkan kontrak ke KPPN, berapapun nilai pengadaan barang/jasa yang didaftarkan pada Inaproc apabila Satker memilih mekanisme pembayaran melalui LS maka wajib didaftarkan kontraknya ke KPPN, hal tersebut berdampak pada capaian indikator kontraktual tidak tercapai secara optimal.

D | Rekomendasi Belanja Negara, diperlukan:

Direktorat Pelaksanaan Anggaran agar mereviu dampak kinerja Capaian IKPA Satker akibat penerapan kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui Inaproc dimana satker tetap harus dan berkewajiban mendaftarkan data kontrak ke KPPN wilayah kerja masing-masing.

HASIL ANALISIS TEMATIK REGIONAL

Analisis Tematik Regional

A | FLPP, Terdapat kenaikan unit dibangun tahun 2025 dari sebelumnya 15.404 unit menjadi 15.729 unit, jumlah lokasi tahun 2025 dari sebelumnya 141 lokasi menjadi 146 lokasi, jumlah penerima tahun 2025 dari sebelumnya 7.970 menjadi 8.149.

B | Giant Sea Wall, di Kalimantan Selatan tidak terdapat program prioritas Giant Sea Wall.

C | Koperasi Desa Merah Putih, Progres realisasi anggaran masih belum terdapat realisasi dari alokasi pagu/perkiraan alokasi dana sebesar Rp6.039 M.

Progres Fase I

Jumlah Desa dan Kel yang Sudah Membentuk Koperasi Merah Putih dan Jumlah Koperasi Desa dan Kel yang Sudah Berbadan Hukum adalah sudah maksimal seperti periode berikutnya yaitu sebanyak 2.013.

Progres Fase II

2. Jumlah Koperasi yang Sudah Memiliki Akun Simkopdes (Microsite) sebanyak 2.013 sudah maksimal seperti periode sebelumnya
3. Jumlah Koperasi yang Sudah Memiliki Gerai (Minimal 1 Gerai) semula 83 menjadi 97.
4. Jumlah Keseluruhan Gerai Koperasi yang Sudah Aktif semula 96 menjadi 125.
5. Jumlah Koperasi Melakukan Permohonan Proposal Bisnis semula 26 menjadi 28.
6. Jumlah Permohonan Proposal Bisnis semula 106 menjadi 111.

Kanwil DJPb Kalsel telah melaksanakan Sharing Session perkembangan implementasi program KDKMP di Kalsel dengan narasumber dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 9 Oktober 2025.

D | Sekolah Rakyat, Terdapat peningkatan realisasi Jumlah Sekolah Rakyat yang sudah berjalan sebanyak 3 SR dari periode sebelumnya 2 SR. Saat ini, target jumlah sekolah rakyat sebanyak 3 SR.

E | SMA Unggul Garuda, Telah dilakukan peresmian SMA Garuda Transformasi pada SMAN Banua, oleh Menteri Ekonomi Kreatif pada tanggal 8 Oktober 2025. Peresmian SMA Garuda di Kalsel ini merupakan bagian dari peluncuran serentak di 16 Sekolah Se-Indonesia yang terdiri dari 4 sekolah baru dan 12 sekolah transformasi.

F | Revitalisasi Sekolah, Belum ada perubahan/tetap dibandingkan periode sebelumnya. pelaksanaan revitalisasi untuk Jumlah target sekolah yang direvitalisasi adalah 61 Sekolah yang terdiri dari 43 madrasah dan 18 sekolah di daerah transmigrasi.

Progres target 43 madrasah adalah 38 madrasah dalam tahap pembangunan, dan 5 masih dalam tahap

lelang pekerjaan.

Progres target 18 sekolah adalah 12 sekolah dalam tahap pembangunan, dan 6 masih dalam tahap lelang pekerjaan.

G | Ketahanan Pangan, Terdapat kenaikan realisasi anggaran untuk mendukung program ketahanan pangan semula Rp96,31 M (7,32%) menjadi Rp112,06M (8,52%) dari alokasi Pagu Anggaran Rp1.314,84 M.

H | Ketahanan Energi, Kinerja Program Ketahanan Energi (s.d. 03 Oktober 2025), Pemerintah Kab. HST sedang mengusulkan untuk pembangunan Bendungan Pancur Hanau senilai Rp30 miliar. Bendungan ini merupakan infrastruktur vital yang tidak hanya berfungsi sebagai penyedia air baku, irigasi, dan pengendali banjir, tetapi juga berperan penting dalam penyediaan energi.

Isu dan Rekomendasi Tematik Regional

A | Isu FLPP, meliputi:

1. Belum adanya wadah/forum komunikasi/koordinasi di setiap daerah terkait program FLPP.
2. Kurangnya monitoring pasca-kepemilikan untuk memastikan rumah yang dibeli benar-benar ditempati oleh MBR dan memberikan manfaat optimal.

B | Rekomendasi FLPP, diperlukan:

1. Agar dibentuk forum komunikasi/koordinasi di setiap daerah untuk mendukung pelaksanaan program FLPP.
2. Pemerintah daerah dapat dilibatkan secara aktif dalam melakukan verifikasi lapangan secara berkala untuk memastikan rumah benar-benar ditempati oleh MBR sesuai peruntukannya. Perlu disusun mekanisme sanksi administratif bagi penerima manfaat yang menyalahgunakan bantuan, serta didorong partisipasi masyarakat melalui pembentukan kelompok penghuni sebagai mitra pengawasan sosial.

C | Isu Giant Sea Wall, meliputi:

Di Kalimantan Selatan tidak terdapat program prioritas Giant Sea Wall.

D | Rekomendasi Giant Sea Wall, diperlukan:

Di Kalimantan Selatan tidak terdapat program prioritas Giant Sea Wall.

E | Isu Koperasi Desa Merah Putih, meliputi:

Dengan implementasi digitalisasi dan integrasi sistem informasi SIMKOPDES, beberapa KDMP di daerah:

1. Masih terjadi Keterbatasan literasi digital dan manajerial pengurus koperasi baru.
2. *Blank spot* internet di beberapa desa menyebabkan keterlambatan pembaruan data di SimKopDes.

F | Rekomendasi Koperasi Desa Merah Putih, diperlukan:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan literasi digital, manajemen koperasi, dan penggunaan aplikasi SIMKOPDES bagi pengurus koperasi secara berkelanjutan, baik secara daring maupun luring.
2. Penguatan dukungan infrastruktur teknologi informasi melalui kerja sama dengan dinas komunikasi dan informatika serta penyedia layanan telekomunikasi untuk memperluas jaringan internet di wilayah pedesaan. termasuk pemanfaatan solusi alternatif seperti iaringan VSAT atau internet

berbasis komunitas

G | Isu Sekolah Rakyat, meliputi:

Seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan sudah menyampaikan usulan lokasi sekolah rakyat dan selanjutnya menunggu verifikasi dari Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum.

H | Rekomendasi Sekolah Rakyat, diperlukan:

Pemda agar menjalankan peran proaktif dan fasilitatif di tingkat daerah untuk mempercepat proses administrasi yang menjadi kewenangan Pemda, dan berkoordinasi aktif dengan Pemerintah Pusat.

I | Isu SMA Unggul Garuda meliputi:

Diharapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan benar-benar memanfaatkan kesempatan baik ini untuk melahirkan generasi muda unggul yang '*Go Internasional*' dan kembali ke daerah untuk membangun Kalimantan Selatan.

J | Rekomendasi SMA Unggul Garuda, diperlukan:

Perlu disiapkan program beasiswa, pertukaran pelajar, dan pelatihan internasional bagi peserta didik berprestasi agar mampu mengembangkan wawasan global dan kompetensi internasional. Pemerintah juga perlu memastikan adanya mekanisme pembinaan dan reintegrasi bagi lulusan Sekolah Garuda agar potensi dan pengetahuan yang mereka peroleh di luar daerah maupun luar negeri dapat dikontribusikan kembali untuk kemajuan Kalimantan Selatan.

K | Isu Revitalisasi Sekolah, meliputi:

1. Kapasitas pengelolaan satuan pendidikan belum merata;
2. Akuntabilitas penggunaan dana masih berisiko;
3. Koordinasi lintas level pusat–daerah belum optimal;
4. Pemeliharaan pasca revitalisasi belum terencana.

L | Rekomendasi Revitalisasi Sekolah, diperlukan:

1. Laksanakan bimtek dan pendampingan teknis P2SP (Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan);
2. Gunakan sistem pelaporan dan monitoring digital dan tingkatkan audit berbasis risiko dan transparansi publik;
3. Bentuk tim koordinasi revitalisasi berjenjang dan tetapkan SOP komunikasi dan evaluasi berkala lintas instansi;
4. Wajibkan rencana pemeliharaan 3–5 tahun; libatkan masyarakat dan Pemda dalam perawatan berkelanjutan.

M | Isu Ketahanan Pangan meliputi:

Untuk kegiatan CSR-Oplah (Cetak Sawah Rakyat dan Optimalisasi Lahan), perencanaan disusun pada tahun yang sama dengan pelaksanaan kegiatannya mengakibatkan progres capaian menjadi lambat.

N | Rekomendasi Ketahanan Pangan, diperlukan:

Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan setiap tahapan pelaksanaan sesuai target dan jadwal.

O | Isu Ketahanan Energi, meliputi:

Terdapat 2 pembangkit bio energi berjenis biomassa dengan jaringan *off grid* (tidak terhubung

langsung dengan jaringan umum) di Kabupaten Tabalong dengan total kapasitas 2,6 MW, yaitu: Pembangkit pertama dikelola oleh PT. Cakung Permata Nusa I (ATA) di desa Kasiau dengan kapasitas 1,1 MW; dan Pembangkit kedua dikelola oleh PT. Astra Agro Lestari di desa Hayub dengan kapasitas 1,6 MW..

P | Rekomendasi Ketahanan Energi, diperlukan:

Pemerintah daerah perlu memfasilitasi integrasi lokal, misalnya melalui penyediaan jaringan distribusi mini-grid atau skema off-taker lokal, agar listrik yang dihasilkan dapat dimanfaatkan masyarakat dan industri di sekitar lokasi.

HASIL ANALISIS MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG)

Analisis MBG

Terdapat kenaikan jumlah SPPG sebelumnya dari 122 menjadi 134, jumlah supplier sebelumnya 92 menjadi 96, dan penerima manfaat sebelumnya 357.789 menjadi 359.142.

Kanwil DJPb Kalsel telah menyampaikan laporan rekapitulasi pelaksanaan survei MBG pada SPPG lingkup Provinsi Kalsel kepada Direktorat Pelaksanaan Anggaran dengan ND-741/WPB.19/2025.

Isu dan Rekomendasi MBG

A | Isu MBG, meliputi:

1. Hari Kamis, 9 Oktober 2025, di media ada berita keracunan MBG di sekolah Assalam Martapura. Korban kurang lebih 15 orang dirawat di RS Raza.
2. Seiring bertambahnya SPPG, diperlukan pengaturan menu pada beberapa SPPG yang berada dalam satu wilayah (berdekatan) untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan bahan baku dan kenaikan harga.

B | Rekomendasi MBG, diperlukan:

1. Perlunya pengawasan atas kebersihan dan higienitas MBG. Harus diatur pula sanksi atas kasus keracunan seperti ini.
2. Optimalisasi peran koordinator wilayah SPPG untuk mengkoordinasikan SPPG dalam satu wilayah.